

Masyarakat sekitar Komplek Makam Gunungpring sebagian sudah sadar wisata. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang belum memiliki kesadaran wisata. Sebagian besar masyarakat sekitar Komplek Makam Gunungpring belum tergerak untuk ikut serta dalam pengembangan wisata, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pelaku wisata. Kemudian melakukan penyuluhan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat sekitar tempat wisata agar ikut serta dalam pengembangan wisata ini sehingga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar Komplek makam Gunungpring.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Sejarah Kabupaten Magelang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Kota Magelang. Pada tahun 1812, Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles mengangkat Ngabei Danuningrat sebagai bupati pertama Magelang dengan gelar Adipati Danuningrat I. Penunjukkan ini terjadi sebagai konsekuensi perjanjian antara Inggris dan Kesultanan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1812 yang menyerahkan wilayah Kedu kepada pemerintah Inggris. Sejak itu, Danuningrat menjadi bupati pertama di Kabupaten Magelang dengan gelar Adipati Danuningrat I. Atas petunjuk dari gurunya, dia memilih daerah antara desa Mantiasih dan desa Gelangan sebagai pusat pemerintahan. Pada tahun 1930, jabatan bupati diserahkan dari dinasti Danuningrat kepada pejabat baru yang bernama Ngabei Danukusumo. Sementara itu sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desentralisasi (*Decentralisatie Besluit*) tahun 1905, Kota Magelang menjadi *gemeente* bersama dengan Kota Semarang, Salatiga, dan Pekalongan. Jabatan walikota baru diangkat pada tahun 1924. Meskipun demikian, kedudukan bupati masih tetap berada di kota Magelang. Akibatnya ada sejumlah pimpinan daerah di kota Magelang yaitu bupati Magelang, residen Kedu, asisten residen Magelang dan walikota Magelang.

Seiring dengan waktu, kedudukan Kabupaten Magelang diperkuat melalui UU No. 2 tahun 1948 dengan ibu kota di Kota Magelang. Pada tahun 1950 berdasarkan UU No. 13 tahun 1950 Kota Magelang berdiri sendiri dan diberi hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, sehingga ada kebijaksanaan untuk memindah ibu kota kabupaten ke daerah lain. Ada dua alternatif ibu kota sebagai pengganti Kota Magelang, yaitu Kawedanan Grabag atau Kawedanan Muntilan, namun kedua daerah ini ditolak. Pada tanggal 22 Maret 1984, kecamatan Mertoyudan bagian Selatan dan kecamatan Mungkid bagian Utara dipilih secara resmi sebagai ibu kota Kabupaten Magelang oleh gubernur Jawa Tengah dengan nama Kota Mungkid.

Masyarakat sekitar Komplek Makam Gunungpring sebagian sudah sadar wisata, mereka memiliki keinginan menjadikan Makam Gunungpring sebagai obyek wisata yang diminati oleh wisatawan sehingga dapat mendongkrak perekonomian. Namun sebagian masyarakatnya masih belum bergerak untuk ikut dalam pengembangan wisata ini. Pemerintah kota khususnya Dinas Pariwisata sudah ikut serta mendampingi masyarakat sekitar dalam pengelolaan komplek Makam Gunungpring

Strategi yang diperlukan dalam pengembangan Makam Gunungpring yaitu meningkatkan kerjasama serta koordinasi antar pelaku wisata sehingga dapat mengoptimalkan potensi wisata Makam Gunungpring. Kemudian memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang